



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2012

PENGESAHAN. *Agreement*. Republik Indonesia-
Bosnia dan Herzegovina. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN
BOSNIA DAN HERZEGOVINA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI
PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF
MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON VISA EXEMPTION FOR
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bali, pada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN BOSNIA DAN HERZEGOVINA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2011 di Bali, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bosnia, Bahasa Kroasia, Bahasa Serbia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bosnia, Bahasa Kroasia, Bahasa Serbia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN KEMENTERIAN BOSNIA DAN HERZEGOVINA
TENTANG
PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK
DAN PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina, selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENGAKUI hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk meningkatkan pembangunan dan kerja sama antara negara masing-masing, guna memfasilitasi kunjungan warga negaranya;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

Warga negara masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, tidak wajib memperoleh visa untuk memasuki wilayah Pihak lainnya untuk kunjungan atau tinggal tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal masuk dan tidak dapat diperpanjang.

**PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR**

Jangka waktu berlaku paspor warga negara masing-masing Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

**PASAL 3
PEMBATASAN VISA**

Pemegang paspor masing-masing Pihak yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat memasuki dan mengunjungi tempat dan titik manapun di negara masing-masing yang diizinkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari salah satu pihak yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya antara lain pasangan (merujuk pada suami/istri) dan anak-anak mereka yang belum menikah, tidak bekerja dan berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun, dan orang tua yang menjadi tanggungan, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG

Salah satu Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang berhak atas pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik atau yang dianggap sebagai *persons non grata*.

PASAL 6
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan serta pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 Pasal ini wajib diinformasikan melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya terlebih dahulu.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah negara Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada para pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara yang bersangkutan. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.

**PASAL 9
PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi setiap saat dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

**PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak hari penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhirannya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Bali pada tanggal Dua Puluh Tujuh Mei tahun Dua Ribu Sebelas, dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bosnia, Bahasa Kroasia, Bahasa Serbia, dan Bahasa Inggris. Seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MENTERI LUAR NEGERI

UNTUK DEWAN KEMENTERIAN
BOSNIA DAN HERZEGOVINA

SVEN ALKALAJ
MENTERI LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

**SPORAZUM
IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE
I
VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
O BEZVIZNOM REŽIMU ZA NOSIOCE
DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA**

Vijeće Vlada Republike Indonezije, i ministara Bosne i Hercegovine, u daljnjem tekstu „Strane“;

PRIZNAVAJUĆI postojeće prijateljske veze između dvije države;

ŽELEĆI da povećaju razvoj saradnje između svojih država, kako bi olakšali putovanje svojih državljana;

U SKLADU SA zakonima i odredbama ove dvije države;

DOGOVORILE su se o sljedećem:

**ČLAN 1
IZUZEĆE OD VIZA**

Državljeni bilo koje Strane, koji su nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, biti će izuzeti od obaveze dobivanja vize u svrhu ulaska na teritoriju druge Strane za posjetu ili boravak koji ne prelazi trideset 30 (trideset) dana od dana ulaska i boravak se ne može produžiti.

**ČLAN 2
ROK TRAJANJA PASOŠA**

Rok trajanja pasoša državljana bilo koje Strane biti će najmanje 6 (šest) mjeseci prije ulaska na teritoriju druge Strane.

**ČLAN 3
VIZNA OGRANIČENJA**

Nosioci važećih pasoša bilo koje Strane ovog Sporazuma, mogu ući i posjetiti bilo koje mjesto i tačku na teritoriju druge države što je dozvoljeno od strane vlasti.

B

85

ČLAN 4
VIZA ZA ČLANOVE DIPLOMATSKIE ILI KONZULARNE MISIJE

Nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša bilo koje Strane koji su članovi diplomatske ili konzularne misije na teritoriju druge Strane, uključujući članove njihove obitelji, tj. bračnog druga (odnosi se na suprugu/supruga) i njihovu nevjenčanu i nezaposlenu djecu do 25 godina starosti, kao i roditelji koji ovise o njima, morat će imati odgovarajuću ulaznu vizu izdatu od strane ambasade druge Strane prije ulaska na teritorij druge Strane.

ČLAN 5
PRAVO NADLEŽNIH ORGANA

Bilo koja Strana zadržava pravo da odbije ulazak ili da skрати vrijeme boravka bilo koje osobe koja ima pravo na izuzeće od vize i olakšanja u skladu sa ovim Sporazumom, zbog razloga državne sigurnosti, javnog reda ili javnog zdravlja ili ako je neko proglašen nepoželjnom osobom (*persona non grata*).

ČLAN 6
SUSPENZIJA

1. Svaka Strana, u bilo koje vrijeme, može privremeno suspendovati ovaj Sporazum, ili u cijelosti, ili dio ovog Sporazuma, zbog razloga državne sigurnosti, javnog reda ili javnog zdravlja.
2. O uvođenju, kao i prekidu mjera, navedenih u stavu 1 ovog Člana obavijestiti će se druga Strana unaprijed, putem diplomatskih kanala.

ČLAN 7
SPECIMENI PASOŠA

1. U roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma, Strane će razmijeniti putem diplomatskih kanala specimene njihovih važećih diplomatskih i službenih pasoša.
2. Strane će pismeno obavijestiti jedna drugu u slučaju uvođenja novih putnih isprava, ili izmjena kod postojećih, najmanje trideset (30) dana prije datuma izdavanja nove isprave ili njene promjene.
3. U slučaju ako državljani bilo koje Strane izgube ili oštete svoje diplomatske ili službene pasoše na teritoriju druge Strane, odmah će obavijestiti nadležne organe Strane primateljice putem diplomatske misije ili konzularne ispostave države čiji su državljani. Diplomatska misija ili konzularna ispostava izdati će gore spomenutim osobama, u skladu sa zakonima svoje države, dokument za povratak u državu čiji su državljani.

**ČLAN 8
RJEŠAVANJE SPOROVA**

Sporovi između Strana koji su povezani sa implementacijom ili tumačenjem ovog Sporazuma biti će riješeni na prijateljski način kroz konsultacije ili pregovore Strana.

**ČLAN 9
IZMJENE I DOPUNE**

Ovaj Sporazum može biti pismeno dopunjen ili izmijenjen u bilo koje vrijeme, zajedničkim dogovorom Strana. Takve dopune ili izmjene stupit će na snagu na dan kada to odluče Strane, i biti će integralni dio ovog Sporazuma.

**ČLAN 10
STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I ZAVRŠETAK TRAJANJA SPORAZUMA**

1. Ovaj Sporazum će stupiti na snagu 30 (trideset) dana nakon datuma prijema poslijednje pismene obavijesti kojom Strane obavještavaju jedna drugu putem diplomatskih kanala, da su svi uslovi za stupanje na snagu ovog Sporazuma, u skladu sa unutrašnjim procedurama, ispunjeni.
2. Ovaj Sporazum se zaključuje na period od 5 (pet) godina i može se obnoviti automatski za još 5 (pet) godina, osim ako ga jedna od Strana ne raskine u pismenoj formi putem diplomatskih kanala, 30 (trideset) dana prije datuma očekivanog završetka trajanja Sporazuma.

U POTVRDU NAVEDENOG, su dole potpisani, propisno ovlašteni od svojih vlada potpisali ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u Baliju, dvadeset sedmog dana, mjeseca maja, dvije hiljade jedanaeste godine u duplikatu na indonezijskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja i tumačenja, prevladaće verzija na engleskom jeziku.

ZA VLADU
REPUBLIKE INDONESIA

DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

ZA VLJEČE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE

SVEN ALKALAJ
MINISTAR VANJSKIH POSLOVA



REPUBLIK INDONESIA

**S P O R A Z U M
IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE
I
VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
O SEZVIZNOM REŽIMU ZA NOSITELJE
DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA**

Vijeće Vlada Republike Indonezije, i ministara Bosne i Hercegovine, u daljnjem tekstu „Strane“;

PRIZNAVAJUĆI postojeće prijateljske veze između dvije države;

ŽELEĆI da povećaju razvoj suradnje između svojih država, kako bi olakšali putovanje svojih državljana;

SUKLADNO SA zakonima i odredbama ove dvije države,

DOGOVORILE su se o slijedećem:

**ČLANAK 1
IZUZEĆE OD VIZA**

Državljanin bilo koje Strane, koji su nositelji diplomatskih ili službenih putovnica, biti će izuzeti od obaveze dobijanja vize u svrhu ulaska na teritorij druge ugovorne strane za posjetu ili boravak koji ne prelazi trideset 30 (trideset) dana od dana ulaska i boravak se ne može produžiti.

**ČLANAK 2
ROK TRAJANJA PUTOVNICA**

Rok trajanja putovnica državljanin bilo koje ugovorne strane biti će najmanje 6 (šest) mjeseci prije ulaska na teritorij druge Strane.

**ČLANAK 3
VIZNA OGRANIČENJA**

Nosioci važećih putovnica bilo koje Strane ovog Sporazuma, mogu ući i posjetiti bilo koje mjesto i točku na teritoriju druge države što je dozvoljeno od strane vlasti.

ČLANAK 4
VIZA ZA ČLANOVE DIPLOMATSKIE ILI KONZULARNE MISIJE

Nosioci važećih diplomatskih ili službenih putovnica bilo koje Strane koji su članovi diplomatske ili konzularne misije na teritoriju druge Strane, uključujući članove njihove obitelji, tj. bračnog druga (odnosi se na suprugu/supruga) i njihovu nevjenčanu i nezaposlenu djecu do 25 godina starosti, kao i roditelji koji ovise o njima, morat će imati odgovarajuću ulaznu vizu izdatu od strane ambasade druge Strane prije ulaska na teritorij druge Strane.

ČLANAK 5
PRAVO NADLEŽNIH ORGANA

Bilo koja Strana zadržava pravo da odbije ulazak ili da skрати vrijeme boravka bilo koje osobe koja ima pravo na izuzeće od vize i olakšanja u skladu sa ovim Sporazumom, zbog razloga državne sigurnosti, javnog reda ili javnog zdravlja ili ako je neko proglašen nepoželjnom osobom (*persona non grata*).

ČLANAK 6
SUSPENZIJA

1. Svaka Strana, u bilo koje vrijeme, može privremeno suspendirati ovaj Sporazum, ili u cijelosti, ili dio ovog Sporazuma, zbog razloga državne sigurnosti, javnog reda ili javnog zdravlja.
2. O uvođenju, kao i prekidu mjera, navedenih u stavku 1 ovog Članka obavijestiti će se druga Strana unaprijed, putem diplomatskih kanala.

ČLANAK 7
SPECIMENI PUTOVNICA

1. U roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma, Strane će razmijeniti putem diplomatskih kanala specimene njihovih važećih diplomatskih i službenih putovnica.
2. Strane će pismeno obavijestiti jedna drugu u slučaju uvođenja novih putnih isprava, ili izmjena kod postojećih, najmanje trideset (30) dana prije datuma izdavanja nove isprave ili njene promjene.
3. U slučaju ako državljani bilo koje Strane izgube ili oštete svoje diplomatske ili službene putovnice na teritoriju druge ugovorne strane, odmah će obavijestiti nadležne organe Strane primateljice putem diplomatske misije ili konzularne ispostave države čiji su državljani. Diplomatska misija ili konzularna ispostava izdati će gore spomenutim osobama, u skladu sa zakonima svoje države, dokument za povratak u državu čiji su državljani.

2

31

ČLANAK 8 RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporovi između Strana koji su povezani sa implementacijom ili tumačenjem ovog Sporazuma biti će riješeni na prijateljski način kroz konsultacije ili pregovore Strana.

ČLANAK 9 IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Sporazum može biti pismeno dopunjen ili izmijenjen u bilo koje vrijeme, zajedničkim dogovorom Strana. Takve dopune ili izmjene stupit će na snagu na dan kada to odluče Strane, i biti će integralni dio ovog Sporazuma.

ČLANAK 10 STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I ZAVRŠETAK TRAJANJA SPORAZUMA

1. Ovaj Sporazum će stupiti na snagu 30 (trideset) dana nakon datuma prijema posljednje pismene obavijesti kojom Strane obavještavaju jedna drugu, putem diplomatskih kanala, da su svi uslovi za stupanje na snagu ovog Sporazuma, u skladu sa unutrašnjim procedurama, ispunjeni.
2. Ovaj Sporazum se zaključuje na period od 5 (pet) godina i može se obnoviti automatski za još 5 (pet) godina, osim ako ga jedna od Strana ne raskine u pismenoj formi putem diplomatskih kanala, 30 (trideset) dana prije datuma očekivanog završetka trajanja Sporazuma.

U POTVRDU NAVEDENOG, su dole potpisani, propisno ovlašteni od svojih Vlada potpisali ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u Baliu, dvadeset sedmog dana, mjeseca svibnja, dvije tisuće jedanaeste godine u duplikatu na indonezijskom, hrvatskom, srpskom, bosanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, prevlađaće verzija na engleskom jeziku.

ZA VLADU
REPUBLIKE INDONESIA

DR. R. A. MARTY M. NATALEGAWA
MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

ZA VJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE

SVEN ALKALAJ
MINISTAR VANJSKIH POSLOVA



REPUBLIK INDONESIA

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ
И
САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
О БЕЗВИЗНОМ РЕЖИМУ ЗА НОСИОЦЕ
ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША

Савјет Влада Републике Индонезије, и министара Босне и Херцеговине, у даљњем тексту „Стране“;

ПРИЗНАВАЈУЋИ постојеће пријатељске везе између двије државе,

ЖЕЛЕЋИ да повећају развој сарадње између својих држава, како би олакшали путовање својих држављана;

У СКЛАДУ СА законима и одредбама ове двије државе,

ДОГОВОРИЛЕ су се о следећем:

ЧЛАН 1
ИЗУЗЕЋЕ ОД ВИЗА

Држављани било које Стране, који су носиоци дипломатских или службених пасоша, бити ће изузети од обавезе добивања визе у сврху уласка на територију друге Стране за посјету или боравак који не прелази тридесет 30 (тридесет) дана од дана уласка и боравак се не може продужити.

ЧЛАН 2
РОК ТРАЈАЊА ПАСОША

Рок трајања пасоша држављана било које Стране бити ће најмање 6 (шест) мјесеци прије уласка на територију друге Стране.

ЧЛАН 3
ВИЗНА ОГРАНИЧЕЊА

Носиоци важећих пасоша било које Стране овог Споразума, могу ући и посјетити било које мјесто и тачку на територију друге државе што је дозвољено од стране власти.

ЧЛАН 4
ВИЗА ЗА ЧЛАНОВЕ ДИПЛОМАТСКЕ ИЛИ КОНЗУЛАРНЕ МИСИЈЕ

Носиоци важећих дипломатских или службених пасоша било које Стране који су чланови дипломатске или конзуларне мисије на територију друге Стране, укључујући чланове њихове обитељи, тј. брачног друга (односи се на супругу/супруга) и њихову невјенчану и незапослену дјецу до 25 година старости, као и родитељи који овисе о њима, морат ће имати одговарајућу улазну визу издату од стране амбасаде друге Стране прије уласка на територију друге Стране.

ЧЛАН 5
ПРАВО НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Било која Страна задржава право да одбије улазак или да скрати вријеме боравка било које особе која има право на изузеће од визе и олакшања у складу са овим Споразумом, због разлога државне сигурности, јавног реда или јавног здравља или ако је неко проглашен непожељном особом (*persona non grata*).

ЧЛАН 6
СУСПЕНЗИЈА

1. Свака Страна, у било које вријеме, може привремено суспендовати овај Споразум, или у цијелости, или дио овог Споразума, због разлога државне безбједности, јавног реда или јавног здравља.
2. О увођењу, као и прекиду мјера, наведених у ставу 1 овог Члана обавијестити ће се друга Страна унапријед, путем дипломатских канала.

ЧЛАН 7
СПЕЦИМЕНИ ПАСОША

1. У року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања овог Споразума, Стране ће размијенити путем дипломатских канала специмене њихових важећих дипломатских и службених пасоша.
2. Стране ће писмено обавијестити једна другу у случају увођења нових путних исправа, или измјена код постојећих, најмање тридесет (30) дана прије датума издавања нове исправе или њене промјене.
3. У случају ако држављани било које Стране изгубе или оштете своје дипломатске или службене пасоше на територију друге Стране, одмах ће обавијестити надлежне органе Стране приматељице путем дипломатске мисије или конзуларне испостава државе чији су држављани. Дипломатска мисије или конзуларна испостава издати ће горе споменути особама, у складу са законима своје државе, документ за повратак у државу чији су држављани.

В

45

ЧЛАН 8 РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Спорови између Страна који су повезани са имплементацијом или тумачењем овог Споразума бити ће ријешени на пријатељски начин кроз консултације или преговоре Страна.

ЧЛАН 9 ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

Овај Споразум може бити писмено допуњен или измијењен у било које вријеме заједничким договором Страна. Такве допуне или измјене ступит ће на снагу на дан када то одлуче Стране, и бити ће интегрални дио овог Споразума.

ЧЛАН 10 СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ТРАЈАЊЕ И ЗАВРШЕТАК ТРАЈАЊА СПОРАЗУМА

1. Овај Споразум ће ступити на снагу 30 (тридесет) дана након датума пријема последње писмене обавијести којом Стране обавјештавају једна другу, путем дипломатских канала, да су сви услови за ступање на снагу овог Споразума, у складу са унутрашњим процедурама, испуњени.
2. Овај Споразум се закључује на период од 5 (пет) година и може се обновити аутоматски за још 5 (пет) година, осим ако га једна од Страна не раскине у писменој форми путем дипломатских канала, 30 (тридесет) дана прије датума очекиваног завршетка трајања Споразума.

У ПОТВРДУ НАВЕДЕНОГ, су доле потписани, прописно овлаштени од својих Влада потписали овај Споразум.

САСТАВЉЕНО у Балију, двадесет седмог дана, мјесеца маја, двије хиљаде једанаесте године у дупликату на индонезијском, српском, босанском, хрватском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако вјеродостојни. У случају неслагања у тумачења, превладаће верзија на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ

DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA
МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА

ЗА САВЈЕТ МИНИСТРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

СВЕН АЛКАЛАТ
МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
ON
VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, hereinafter referred to as "the Parties";

RECOGNISING the existing friendly ties between the two countries;

DESIRING to increase the development and cooperation between their respective Countries, in order to facilitate the travel of their nationals;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries.

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

Nationals of either Party, who are holders of valid diplomatic and service passports, shall be exempted from the obligation to obtain a visa for the purpose of entering the territory of the other Party for a visit or stay not exceeding 30 (thirty) days from the date of entry and may not be extended.

**ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY**

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

**ARTICLE 3
VISA RESTRICTION**

The holders of the valid passports of either Party referred to this Agreement may enter and visit any place and point of the respective country which is permitted by those authorities.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

The holders of valid diplomatic or service passports of either party assigned as members of the diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members namely the spouse (referring to husband/wife) and their unmarried and unemployed children under the age of 25 years, as well as dependent parents shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to the entry.

ARTICLE 5
THE RIGHT OF AUTHORITIES

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement for reasons of national security, public order or public health or who is regarded as *persona non grata*.

ARTICLE 6
SUSPENSION

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party through diplomatic channels in advance.

ARTICLE 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange to each other, through diplomatic channels, within 30 days after signing of this Agreement, the specimens of their valid diplomatic and service passports.
2. In case of introduction of new diplomatic or service passport, as well as, modifications of existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case of nationals of either Parties lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the State of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving Party through diplomatic mission or consular post of the State of their nationality. The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with their national legislation, a document for returning to the State of their nationality.

**ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.

**ARTICLE 9
AMENDMENT**

This Agreement may be amended or revised at any time by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment or revision shall enter into force on the date determined by the Parties and form as integral part of this Agreement.

**ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of receipt of the last written notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channel, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period 5 (five) years and may be renewed consecutively for further 5 (five) years, unless either Party decides to terminate it by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to the expected date of termination.

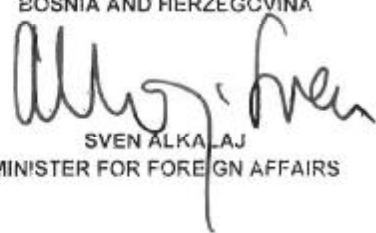
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement

DONE at Bali on the Twenty Seventh of May, in the year Two Thousand and Eleven in duplicate in the Indonesian, Bosnian, Croatian, Serbian, and English languages. All texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA


DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

FOR THE COUNCIL OF MINISTERS OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA


SVEN ALKA LAJ
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS